

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kontribusi besar meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi. Pada tahun 2016 Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 mencapai 60 persen menuju 70 persen, hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dari jumlah tersebut 30,3% disumbang oleh usaha mikro, (www.depkop.go.id). UMKM di Indonesia mencapai 72.2 juta unit usaha pada tahun 2015, usaha tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melihat peran penting tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang lebih maju dengan akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan.

Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Basri dan Nugroho, 2009). Namun pada prakteknya realisasi KUR jauh dari target karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih telalu berhati-hati dalam penyaluran kredit terkait tidak

adanya akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).

Melakukan pencatatan dan pembukuan atas transaksi suatu badan usaha mikro kecil dan menengah sepatutnya dilakukan terlepas dari besar kecilnya nilai suatu transaksi. Pembukuan dan pencatatan terperinci dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan dan pembukuan yang berujung pada laporan keuangan yang informatif, maka tercapainya suatu tujuan dan kinerja dari usaha mikro kecil dan menengah dapat dinilai. Tak hanya itu saja, pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku memudahkan para pelaku usaha memperoleh pinjaman untuk penambahan biaya modal atas usahanya.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 telah mensahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut (SAK EMKM, 2016). SAK EMKM dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan karena dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis.

Laporan keuangan bagi suatu perusahaan sangatlah penting untuk mencatat secara rinci biaya yang dikeluarkan, sebagai evaluasi kinerja entitas dan juga sebagai pertimbangan untuk kelangsungan usahanya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (SAK EMKM, 2018).

Melakukan perluasan pasar bukan hal utama yang menjadi tantangan bagi UMKM, namun perlu diperhatikan pula bahwa seiring dengan berjalannya suatu kegiatan usaha mikro kecil dan menengah sudah tentu membutuhkan pembiayaan yang memadai demi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang dilakukan serta untuk mendukung tumbuh kembang UMKM tersebut (Uno, dkk, 2019).

Menurut Sujarweni (2019) kendala yang dihadapi pelaku UMKM dari sisi internal yaitu dari sisi modal masih terdapat kesulitan dalam hal peminjaman modal terutama pada saat pengajuan kredit di lembaga keuangan perbankan. Sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia, mengharuskan UMKM agar membuat laporan keuangan sebagai syarat pengajuan kredit. Adapun hambatan UMKM dari sisi sumber daya manusia atau SDM antara lain yaitu kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap teknologi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, pemasaran produk masih sangat sederhana yaitu dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produknya, para

pelaku UMKM belum dapat memahami pangsa pasar dengan baik sehingga belum mampu mengetahui dengan cermat apa yang dibutuhkan para konsumen, keterbatasan kemampuan untuk membayar pegawai sehingga para pelaku UMKM belum dapat melibatkan banyak tenaga kerja, banyaknya para pelaku UMKM yang kurang memperhatikan strategis maupun tujuan jangka panjang usahanya.

Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dari sisi hukum yaitu para pelaku UMKM berbadan hukum perseorangan akan tetapi ada yang berbadan hukum persekutuan maupun perseroan terbatas. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dari sisi akuntabilitas yaitu masih banyaknya UMKM yang belum mempunyai administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Disamping itu terdapat kendala dari sisi internal yang harus dihadapi para pelaku UMKM yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan oleh UMKM dalam menghasilkan produk, UMKM belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah terutama bagi UMKM yang telah melakukan ekspor sehingga seringkali tertinggal jauh dengan usaha berskala besar dan keterbatasan akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok bisnis tertentu.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Ismadewi, dkk (2017) menjelaskan bahwa kendala yang dialami oleh usaha ayam broiler Sudiasa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu faktor SDM atau sumber daya manusia dalam keuangan, tingkat kompetensi dan lingkup organisasi yang kecil. Kendala yang dialami pengusaha UMKM adalah kedisiplinan dalam membuat setiap transaksi dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini menjadi

pemikiran bagi pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM Indonesia yang maju dan mandiri, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (ED SAK-EMKM) pada tanggal 18 Mei 2016 dan efektif diberlakukan per 1 Januari 2018. Dengan disahkannya ED SAK-EMKM ini, akan melengkapi standar akuntansi keuangan di Indonesia yang berdiri dengan 3 pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. SAK EMKM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dengan pedoman dan standar yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP yang sebelumnya diberlakukan bagi UMKM (Uno, dkk, 2019).

Berdasarkan penelitian Warsadi, dkk (2017) dijelaskan bahwa UKM menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana dan manual dikarenakan UKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tidak diterapkannya SAK EMKM yaitu kurangnya pengetahuan pemilik usaha tentang adanya Standar Akuntansi dalam melakukan pencatatan keuangan yaitu SAK EMKM, bagian administrasi melakukan pencatatan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan serta perhitungan laba, tidak adanya sosialisasi yang memperkenalkan adanya SAK EMKM, dan selama ini perbankan telah ikut serta membantu para pemilik UKM dalam pengajuan kredit dengan cara membantu dalam menyusun laporan keuangan serta Peraturan Pemerintah yang baru tentang perpajakan yaitu PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, hal ini

mempermudah UKM dan menyebabkan penerapan SAK EMKM lambat dan sulit untuk di terapkan.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Ningtyas (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan UMKM sangat sederhana dan cenderung mengabaikan aturan administrasi keuangan standard. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Mortigor Afrizal Purba (2019) menunjukkan Usaha Mikro Kecil Menengah membutuhkan strategi pengelolaan keuangan, dimana strategi tersebut dibuat dengan tujuan agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu upaya pengelolaan keuangan adalah dengan menyusun laporan keuangan tiap periode untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Namun ada hasil penemuan penelitian bahwa adanya ketidaktahuan manajemen terhadap SAK-EMKM diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang mereka kelola atau usaha yang mereka operasikan, sehingga terjadi permasalahan keuangan usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Wiwiek Kurniawati (2019) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) belum diterapkan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu minimnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan, tidak adanya penyuluhan mengenai bagaimana cara penerapan SAK EMKM pada UKM dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan pada usaha EMKM peternakan sapi potong, Sumber Ternak di Kabupaten Magetan. Sebagai pelaku EMKM peternakan sapi

potong, Bapak Feri mengatakan bahwa pencatatan laporan keuangan masih dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan mencatat transaksi transaksi yang terjadi sesuai dengan kemampuannya. Bapak Feri mengatakan bahwa belum mendapat sosialisasi atau pengetahuan mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standard yang berlaku sehingga belum diketahui secara jelas besar keuntungan yang di peroleh dari usaha yang dijalankan.

Andi Amran (Menteri Pertanian) mengatakan bahwa 50% dari total sapi yang lahir di Indonesia berasal dari Magetan. Pada triwulan satu (2018), ternak sapi potong sebanyak 127.640 ekor, sapi perah 295 ekor, kambing 41.793 ekor, domba 35.555 ekor, unggas dari berbagai jenis sebanyak 6,8 juta ekor dan kelinci lebih sekitar 52 ribu ekor (fajar.co.id).

Dari pernyataan (Menteri Pertanian) Andi Amran yang telah diliput oleh fajar.co.id dapat diketahui bahwa Magetan menyumbang sebanyak 50% dari total sapi yang lahir di Indonesia. Selain itu, Magetan memiliki jumlah ternak paling banyak yaitu sapi potong sebanyak 127.640 ekor. Dengan banyaknya jumlah ternak tersebut peneliti ingin mengetahui apakah pemilik usaha telah mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Karena laporan keuangan dapat membantu pemilik atau pihak lain untuk mengontrol keuangan dan menentukan target selanjutnya dengan tujuan pengembangan usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan

Menengah (SAK EMKM) sangat penting untuk kemajuan usaha serta pengembangan usaha yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil judul **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN (SAK-EMKM) STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA USAHA SUMBER TERNAK**

(Sudy Empiris pada Usaha Sumber Ternak Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang selanjutnya dibuat dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti.

Berikut rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian :

1. Bagaimana Laporan Keuangan pada Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak di Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan Periode 2017-2020 ?
2. Apakah Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak di Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Periode 2017-2020 ?

3. Kendala apa saja yang dihadapi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak di Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan Periode 2017-2020 ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada atau belum diketahui. Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Menganalisis laporan keuangan pada Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak di Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab.Magetan Periode 2017-2020.
- b. Menganalisis apakah Laporan Keuangan pada Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak di Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab.Magetan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Periode 2017-2020.
- c. Menganalisis kendala yang dihadapi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak di Ds. Sarangan Kec. Plaosan Kab.Magetan Periode 2017-2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini dapat menambah literatur yang dapat digunakan sebagai bahan referensi pada UPTD Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo terkait dengan akuntansi EMKM khususnya mengenai laporan keuangan EMKM.

b. Objek Yang Diteliti

Penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

c. Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait Laporan Keuangan yang terjadi pada Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) Sumber Ternak. Sehingga diperoleh persepsi yang jelas terkait Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

d. Penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dimana peneliti selanjutnya dapat melanjutkan, melengkapi maupun mengambil variabel tertentu dalam penelitian ini yang kemudian di kombinasikan dengan penelitian lain.